



► KRIMINALITAS PELAJAR

# Penanganan Kejahatan Jalanan Masuk APBD

*Ujang Hasanudin, Yosef Leon, & Abdul Hamid Razak*  
*redaksi@harianjogja.com*

JOGJA—Kota Jogja bakal menganggarkan penanganan kejahatan jalanan atau familier disebut *klithih* dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Program itu nantinya diusulkan pada APBD perubahan 2022.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja, Danang Rudyatmoko, mengaku akan berupaya mengevaluasi APBD perubahan 2022. Penanganan kejahatan jalanan nantinya coba untuk dimasukkan dalam pembahasan APBD perubahan 2022.

## Penanganan Kejahatan...

"Yang pasti kami akan evaluasi APBD tahun ini. Maka nanti pada saat pembahasan perubahan APBD 2022 akan kami coba masukkan kegiatan tersebut," kata Danang, Minggu (10/4).

Menurutnya, dalam pembahasan APBD 2022 lalu Pemkot Jogja masih fokus pada upaya penanganan dan pengendalian Covid-19 serta percepatan pemulihan ekonomi. Sehingga belum memasukkan anggaran yang berkaitan dengan penanganan *klithih*. "Pada waktu pembahasan bulan November tahun lalu, anggaran kita juga terbatas karena memang di plafon defisitnya enggak boleh lebih dari 5 persen. Sedangkan konsentrasi kegiatan masih difokuskan untuk penanganan Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi," kata dia.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi, mengatakan selama ini sejumlah instansi dan dinas terkait lainnya sudah menyelenggarakan program penanganan kekerasan jalanan yang dibebankan dalam APBD. Misalnya saja dari Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan, Dinas Pendidikan di sekolah dan lain sebagainya.

"Beberapa kegiatan sudah tercover dengan APBD. Sehingga instruksi terakhir adalah bagaimana memaksimalkan peran keluarga dan masyarakat untuk ikut mengawasi pergaulan dan pembatasan kegiatan anak," ujar dia.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X pada Kamis (7/4) lalu menerbitkan Surat Edaran (SE) bernomor 050/5082 tentang pencegahan dan penanganan kejahatan jalanan. Melalui edaran ini, secara tegas Sultan meminta kepada bupati dan wali kota untuk melakukan lima langkah penanganan.

Salah satu langkah yang disarankan Gubernur yakni masing-masing kabupaten dan kota agar menganggarkan aktivitas pencegahan dan penanganan kejahatan jalanan dalam APBD masing-masing kabupaten/kota di DIY.

### Sudah Meresahkan

Wakil Ketua DPRD Bantul, Damba Aktivistis, mengatakan mengacu pada SE Gubernur DIY tentang penanganan kejahatan jalanan itu, sepanjang bersifat mendesak, bisa dianggarkan melalui dana tidak terduga. Jika tidak

mendesak, bisa dianggarkan melalui APBD Perubahan 2022. Namun demikian ia menilai kejahatan jalanan akhir-akhir ini sudah meresahkan sehingga membutuhkan penanganan ekstra.

Damba akan merapatkan surat Gubernur tersebut bersama Pemkab Bantul dan juga Forkopimda. Sebab aksi kejahatan jalanan saat ini bukan hanya terjadi di wilayah kota tetapi sudah ke kabupaten, khususnya Bantul dan sangat meresahkan masyarakat.

"Menurut saya ini butuh penanganan segera dan ekstra, karena sudah meresahkan masyarakat," ujar Damba.

Di sisi lain, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan peristiwa kejahatan jalanan harus dicegah mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Namun kuncinya tetap ada pada keluarga. "Karena yang paling bertanggung jawab anak adalah keluarga," katanya, Sabtu (9/4).

Halim mengaku sudah memanggil kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) dan Kepala Balai Pendidikan Menengah Disdikpora DIY untuk berkoordinasi dengan komite sekolah, karena komite sekolah merupakan representasi dari orang tua siswa agar pengawasan anak atau siswa perlu pengawasan dari rumah.

"Orang tua, bapak, ibu harus memantau, mengawasi anak-anak khususnya anak laki-laki agar tidak keluar rumah terlalu malam, karena peristiwa yang terjadi hampir semua terjadi di malam hari."

Bupati juga mendukung imbauan dari Kapolres Bantul AKBP Ihsan agar pukul 22.00 WIB anak-anak tidak ke luar rumah jika tidak ada hajat yang penting. Pada malam hari anak-anak bisa memanfaatkannya untuk belajar ketimbang ke luar rumah yang tidak ada gunanya dan berisiko.

Sementara itu, Pemkab Sleman sudah memiliki Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Kekerasan Anak di Jalanan atau Satgas Antiklithih.

Sekda Sleman Harda Kiswaya mengatakan selain membentuk Satgas keterlibatan Jagawarga di masing-masing kalurahan juga ditingkatkan. "Apa yang dilakukan Pemkab Sleman bahkan mendapat apresiasi dari Polda," katanya, Jumat (8/4).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005